



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ANDI HASNI HAMZAH  
NIK : 7174044210610001  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA BOGOR  
Jabatan : HAKIM  
Jenis Laporan : Periodik - 2025  
Tanggal Kirim : 2 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK/	PERIODE			STATUS	SUMBER PENGHASILAN	METODE PEMBUKUAN
2025	1 BULAN MULAI	s.d	12 BULAN AKHIR	NORMAL	Pekerjaan	Pencatatan

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK**

1. NIK/NPWP	7174044210610001	7. Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri	
2. Nama	ANDI HASNI HAMZAH	(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH/MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)	
3. Jenis ID	KTP	8. NIK/NPWP Suami/Istri	
4. No. ID	7174044210610001	7174041111530002	
5. No. Telepon	081356156650		
6. Email	andihasniamzah@gmail.com		

**B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO**

1 a	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D)	2	454.417.520
b	1) Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c) 2. Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2) Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 3. Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 3) Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? 1. Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan (Lanjut ke pertanyaan 1c) 3. Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c) 4) Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? 1. Dagang (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 2. Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 3. Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 5) Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas	1	
c	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
d	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0

**C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG**

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)		454.417.520
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)		454.417.520
5	Penghasilan tidak kena pajak	TK/0 = 54.000.000	54.000.000
6	Penghasilan kena pajak (4-5)		400.417.000
7	PPh terutang		69.104.250
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)		69.104.250

**D. KREDIT PAJAK**

10 a	Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	2	69.104.250
b	Angsuran PPh Pasal 25		0
c	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)		0
d	Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0



NIK/NPWP

7174044210610001

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

2025

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11	a	PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)		0
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? 1. Tidak, saya tidak memilikinya. lalu ke pertanyaan selanjutnya 2. Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
	c	PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)		0

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

Ganti SPT Sebelumnya



12	a	PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan		-
	b	PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)		-

G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:

1. Dikembalikan melalui pemeriksaan.
2. Dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan.

Nomor rekening

Nama bank

Nama pemilik rekening

H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13	a	Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya, angsuran PPh Pasal 25-nya adalah $1/(12 \text{ atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak}) \times (9-10a)$	1	0
	b	Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 4 Bagian A)	1	0
	c	Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? 1. Tidak, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25. 2. Ya, angsuran PPh Pasal 25 saya adalah 0.75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.	1	

I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14	a	Harta pada akhir Tahun Pajak (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		120.000.000
	b	Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	2	1
	c	Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	2	30.169.000
	d	Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
	e	Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 3C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	
	f	Apakah Anda melaporkan biaya <i>entertainment</i> , biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 3D, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	
	g	Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah)	1	
	h	Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)		0

J. LAMPIRAN TAMBAHAN

15	a	Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit	1	1. Tidak 2. Ya
	b	Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan	1	1. Tidak 2. Ya
	c	Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri	1	1. Tidak 2. Ya
	d	Surat kuasa khusus	1	1. Tidak 2. Ya
	e	Dokumen lainnya	1	1. Tidak 2. Ya

K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan

1

1. Wajib Pajak 2. Kuasa

Tanggal

28 Januari 2026

NIK/NPWP

7174044210610001

Tanda Tangan

Nama

ANDI HASNI HAMZAH



Ditandatangani secara elektronik



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**Direktorat Jenderal Pajak**

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ◆ [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id) ◆  
[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)**

Nomor BPE : **BPE-13489/CT/KPP.1602/2026**  
Tanggal : 28 Januari 2026  
  
NPWP : 7174044210610001  
Nama Wajib Pajak : ANDI HASNI HAMZAH  
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi  
Tahun Pajak : 2025  
Masa Pajak : Januari - Desember 2025  
Status SPT : Normal  
Saluran : Portal Wajib Pajak  
Tanggal Terima SPT : 28 Januari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

*Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.*